



**TAJUK RENCANA**

Mengatasi Kemiskinan di DIY

**BERITA** mengejutkan dilansir koran ini, Kamis (19/1). Berita ini bersumber Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta. Dalam judul disebutkan 'DIY TERMISKIN KEDUA DI JAWA, Utamakan Pemenuhan Kalori Masyarakat'.

Berdasarkan rilis BPS, persentase penduduk miskin DIY awal tahun ini sebesar 11,49 persen atau secara absolut terdapat 463,63 ribu orang. Angka ini naik dibanding kondisi Maret 2022. Di mana persentase penduduk miskin saat itu 11,34 persen atau 454,76 ribu orang. 'Kondisi ini membuat DIY menjadi daerah paling miskin di Pulau Jawa dengan angka kemiskinan di atas rata-rata nasional 9,57 persen. Tentu ini harus mendapatkan perhatian serius,' kata Wakil Ketua DPRD DIY Huda.

Letih paling miskin di Pulau Jawa memang menggejutkan kita semua. Sebab, kalau kita melihat dengan sekilas, banyak daerah di kawasan lainnya di Jawa yang miskin. Namun karena itu merupakan data dari lembaga resmi, yaitu BPS, tentu saja harus kita apresiasi dan kita manfaatkan untuk melakukan berbagai upaya guna mengatasinya. Mudah-mudahan berita tersebut bisa menggugah kita semua untuk bersama-sama ikut berperan mengatasi permasalahan kemiskinan yang masih kita hadapi saat ini.

Meski juga, dari berita tersebut kita melihat aspek kemiskinan di sini hanya berdasarkan tingkat konsumsi. Padahal, sebagaimana pernah disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono, banyak faktor lain di luar masalah konsumsi yang perlu diperhitungkan. Yang terjadi di DIY, kata Sultan, banyak masyarakat yang rela tidak makan namun terkannya kecukupan. Tidak sedikit yang berlantakan tanah, tetapi memiliki tabungannya temak yang banyak. Masyarakat itu *nrimo ora manggan*, tapi terkannya cukup,' kata Sultan pada suatu kesempatan.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan kita memang perlu melihat faktor-faktor terkait secara

komprehensif. Apa saja penyebabnya dan apa saja yang perlu dilakukan. Sedang lembaga yang paling mengetahui masalah ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Badan ini pasti sudah memetakan keadaan yang ada sebenarnya, bahkan juga sudah mempunyai rancangan penanganannya ke depan. Mengenal apa saja yang perlu dan akan dilaksanakan tahun ini pasti juga sudah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baru-baru ini.

Karena itu, dalam melangkah untuk berpartisipasi mengatasi kemiskinan di DIY tepat sekali kalau menggunakan data dari Bappeda DIY. Seperti yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) DIY dan Baznas Kabupaten se-DIY bersama berbagai stakeholder yang menggarap titik-titik kemiskinan ekstrem. Setiap kampung miskin digarap secara keroyokan dari berbagai aspek dengan peran masing-masing stakeholder. Program yang dinamakan Kampung Berkah ini berlangsung tiga tahun, sehingga berkesinambungan dan progresnya kelihatan, bahkan diharapkan bisa tuntas, untuk selanjutnya pindah ke kampung miskin lainnya.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan kita memang harus saling bahu membahu. Kalau jumlah penduduk DIY diproyeksikan 4.073.907 dan yang miskin 463.63 ribu orang, berarti lainnya (lebih dari 3,5 juta) tergolong tidak miskin, bahkan mungkin mampu atau kaya. Seandainya 1 juta di antaranya kaya, dan mau mengeluarkan zakat, infak atau shodaqoh minimal Rp 100 ribu, maka akan terakumulasi dana minimal Rp 100 miliar. Tentu dana ini sangat signifikan untuk program pengentasan kemiskinan. Apalagi kalau mau mengeluarkan zakat 2,5 perses dari harta yang dimiliki, pasti akan terakumulasi dana yang lebih besar lagi.

Karena itu, sesuai ajaran agama, ada sebagian milik orang miskin dari harta yang kita miliki, maka keluarkanlah agar harta yang kita makan bersih dan hidup lebih berkah. ☺

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005